

Pembayaran- pembayaran tidak layak

Introduksi

Organisasi bagi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menyebut penyuapan pegawai pemerintah sebagai suatu “fenomena meluas dalam transaksi-transaksi bisnis internasional, termasuk dalam perdagangan dan investasi...” OECD memperkirakan bahwa penyuapan membuat para pesaing yang jujur kehilangan 77 dari 294 kontrak internasional dari tahun 1994 sampai 1994. Korupsi ini merongrong perdagangan yang bebas dan adil.

Tigapuluh empat negara (termasuk Amerika Serikat dan mitra-mitra dagang terbesarnya) menerapkan Konvensi Pemberantasan Penyuapan Pejabat Pejabat Asing dalam Transaksi-Transaksi Bisnis Internasional (Konvensi) yang disusun OECD. Konvensi ini menetapkan bahwa setiap negara memberlakukan undang-undang yang melarang penyuapan dalam kontrak-kontrak bisnis internasional dan mengharuskan perubahan-perubahan akuntansi untuk membuat lebih mudah pendeteksian kegiatan-kegiatan korupsi seperti itu.

Di Amerika Serikat, restriksi-restriksi mengenai pembayaran-pembayaran yang tidak layak telah ada sejak tahun 1977, ketika Amerika Serikat memberlakukan Undang Undang Praktek-Praktek Korupsi Asing (FCPA). Tahun 1998, FCPA diamandemen untuk memasukkan ketentuan-ketentuan Konvensi ke dalamnya.

Meskipun UTC mengharuskan pematuhan pada undang-undang Amerika Serikat dan negara-negara lain, Kode Etik UTC mengandung pertimbangan-pertimbangan etika yang lebih luas. Kebijakan kami adalah bahwa setiap satuan operasi UTC akan memasarkan dan menjual produk-produk dan jasa-jasanya dengan jujur, dengan mengandalkan pada mutu produk-produk dan jasa-jasanya.

Brosur ini dimaksudkan untuk membantu anda memahami dan menerapkan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang Amerika Serikat dan negara-negara lain dan Kode Etik UTC.

Keberlakuan

Jangkauan FCPA dan Konvensi adalah panjang dan luas. Undang-undang Amerika dan negara-negara lain yang memberlakukan Konvensi dan FCPA berlaku bagi UTC, anak-anak perusahaan dan afiliasi-afiliasinya, dan pegawai-pegawainya. Selain itu, UTC dan pegawai-pegawainya mungkin harus ikut bertanggungjawab kalau suatu pihak ketiga, seperti wakil penjualan atau distributor, melanggar undang-undang.

Orang-orang perusahaan-perusahaan yang didirikan atau melakukan bisnis di negara-negara di luar Amerika dapat dikenai ketentuan FCPA kalau mereka terlibat dalam tindakan yang mendorong kegiatan-kegiatan yang terlarang. Konvensi mengharuskan negara-negara asing memberlakukan undang-undang yang mengatur tindakan-tindakan warganya dan perorangan atau perusahaan dari kebangsaan apapun yang terjadi di dalam atau di luar negara itu.

Karena itu, semua anak perusahaan dan pegawai UTC dapat dikenai restriksi-restriksi Konvensi dan FCPA, tidak soal di mana mereka tinggal atau melakukan transaksi bisnis.

Pejabat-pejabat Pemerintah Asing

Konvensi dan FCPA mengandung ketentuan mengenai pembayaran-pembayaran tidak layak kepada ‘pejabat pemerintah asing.’”

Ini mencakup siapapun yang (1) memegang jabatan melalui pemilihan atau penunjukan dalam kantor atau yudikatif dalam organisasi tingkat lokal atau nasional di sebuah negara asing; (2) memegang jabatan publik, baik perusahaan maupun swasta (misalnya, seorang pejabat maskapai penerbangan atau perusahaan lain yang dinasionalisasi); (3) seorang pejabat atau agen organisasi internasional umum (misalnya, Bank Dunia, Dana Moneter Internasional); (4) seorang pejabat atau agen sebuah partai politik asing; atau (5) seorang kandidat untuk sebuah jabatan politik.

Ini mencakup orang-orang yang bukan pegawai pemerintah tetapi bertindak untuk, atau atas nama, pemerintah, termasuk arsitek swasta, insinyur atau konsultan yang direkrut oleh pemerintah untuk membantu proyek-proyek atau kontrak-kontrak tertentu.

Ingat bahwa Konvensi dan FCPA tidak berlaku untuk pembayaran-pembayaran yang diberikan kepada seorang pejabat publik di negara anda sendiri. Namun pembayaran-pembayaran ini biasanya dianggap sebagai ‘penyogokan’ dan ini adalah ilegal di semua yuridiksi. UTC tidak mau melakukan pembayaran seperti itu.

Pembayaran Pembayaran Tidak Layak

FCPA dan Konvensi melarang—

- Melakukan atau berjanji akan melakukan pembayaran apapun, atau memberikan tunjangan uang lain apapun kepada seorang pejabat publik asing...
- Agar pejabat tadi mengambil tindakan atau tidak mengambil tindakan sehubungan dengan kinerja tugas resminya...
- Kalau tindakan atau non-tindakan ini dapat membuahkan diperolehnya atau dipertahankannya bisnis, atau...
- Menyebabkan si pembayar memperoleh keuntungan yang tidak layak dalam melakukan bisnis (misalnya, sesuatu yang jelas bahwa perusahaan itu sebenarnya tidak berhak untuk mendapatkannya).

Beberapa hal yang harus diperhatikan –

- Anda tidak perlu melakukan pembayaran untuk dianggap melanggar – menawarkan, menjanjikan atau memberikan wewenang untuk memberikan pembayaran atau tunjangan yang bukan uang kontan, cukup untuk membuat anda dianggap melanggar.
- Pembayaran tidak layak itu dapat dalam bentuk uang atau apapun yang berharga, seperti pembelian properti atau jasa dari seorang pejabat publik dengan harga yang sangat dinaikkan, penyediaan hiburan yang berlebih-lebihan, atau pembayaran kepada pihak ketiga kalau yang pada akhirnya mendapat manfaat dari pembayaran itu adalah seorang pejabat publik.

Niat Korupsi

Harus ada niat untuk korupsi. Tujuan pembayaran harus mendapat atau mempertahankan keuntungan yang tidak wajar dalam melakukan bisnis. “Memperoleh atau mempertahankan bisnis” atau “keuntungan yang tidak wajar” mencakup tindakan pemerintah apapun yang bersifat diskresi dan mempengaruhi bisnis perusahaan. Misalnya, pembayaran-pembayaran kepada seorang pejabat asing untuk memperoleh persetujuannya untuk menaikkan harga, mengeluarkan sertifikat inspeksi lift, atau memberi sertifikasi layak terbang untuk sebuah helikopter atau mesin, dilarang.

Ini dapat mencakup situasi dimana anda “seharusnya sudah tahu,” dan anda menghadapi risiko kalau informasi yang dapat anda peroleh akan membuat orang yang nalar melakukan penyidikan lebih jauh. Misalnya, anda diwajibkan untuk menyelidiki tentang komisi tambahan yang diminta oleh seorang wakil penjualan sehari sebelum sebuah kontrak diumumkan. Kalau anda tidak melakukan penyelidikan ini dan wakil penjualan tadi memberikan atau berjanji akan memberikan pembayaran yang tidak layak untuk memastikan penjualan, mungkin anda melakukan pelanggaran.

Ada beberapa “bendera merah.” Contoh:

- Komisi yang lebih besar dari biasanya;
- Permintaan akan “uang muka”;
- Permintaan bahwa komisi diberikan kepada pihak ketiga;
- Penolakan untuk menyertifikasi pematuhan dengan *Kode Etik UTC* atau kebijakan-kebijakan lain;
- Pembayaran dengan uang kontan;
- Kerahasiaan yang luar biasa; atau
- Permintaan-permintaan yang mencurigakan bagi bonus atau pembayaran kembali.

Kesimpulannya: Kalau terasa “aneh,” selidiki lebih jauh. Hubungi Pejabat Praktek/Pematuhan Bisnis anda. Jangan ambil tindakan sebelum anda yakin bahwa anda tidak melakukan pembayaran yang tidak layak.

Uang Pelicin dan Pembayaran-Pembayaran Lain

Menurut Konvensi dan FCPA, sebagian pembayaran untuk pejabat publik asing mungkin dapat diterima kalau tujuan pembayaran adalah untuk memperlancar atau membuat ditanganinya suatu tindakan yang rutin (tidak bersifat diskresi) oleh pemerintah. Ini disebut pembayaran “uang semir” atau “uang pelicin.”

Tindakan rutin pemerintah mencakup mengeluarkan izin, lisensi dan lain-lain untuk melakukan bisnis, memproses visa dan order kerja, memperoleh layanan seperti perlindungan polisi, pengambilan surat, penarikan atau pembongkaran muatan, perlindungan atas produk yang mudah rusak dan lain sebagainya. Ini tidak mencakup tindakan diskresi seperti inspeksi akhir atau putusan menguntungkan yang mempengaruhi bisnis UTC.

Pengeluaran yang dilakukan untuk membayar seorang pejabat publik asing yang terkait dengan mempromosikan, mendemonstrasikan, menjelaskan, atau menyertifikasi produk-produk atau jasa-jasa UTC, atau yang terkait dengan pelaksanaan sebuah kontrak dengan sebuah pemerintah asing, mungkin juga layak. Karena itu, adalah diizinkan untuk membayar biaya pejabat-pejabat publik asing yang melakukan kunjungan ke Amerika untuk meninjau pabrik, menyaksikan demonstrasi produk, melakukan pertemuan-pertemuan bisnis, atau untuk melakukan sertifikasi atau tes penerimaan dan lain sebagainya. Pengeluaran yang dibayar kembali mungkin mencakup biaya yang masuk akal untuk transportasi, makanan dan penginapan pejabat-pejabat tersebut.

PERINGATAN: Meskipun pembayaran uang pelicin dalam jumlah kecil mungkin tidak melanggar Konvensi atau FCPA, pembayaran-pembayaran jenis apapun kepada pejabat pemerintah apapun mungkin melanggar undang-undang setempat. Lingkup pembayaran uang pelicin yang layak sangat sempit dan berbeda-beda dari satu negara ke negara lain. Karena itu, adalah sangat penting bahwa semua proposal mengenai pembayaran kepada seorang pejabat publik asing diperiksa sebelumnya oleh Pejabat Praktek/Pematuhan Bisnis anda. Pembayaran-pembayaran yang diusulkan harus dinilai sesuai dengan FCPA, Konvensi, undang-undang setempat, dan *Kode Etik UTC*.

Salesman-salesman Asing

Banyak pelanggaran yang dilakukan perusahaan menyangkut pembayaran-pembayaran yang dilakukan melalui pihak ketiga, seperti salesman atau konsultan.

UTC sejak lama memiliki kebijakan bahwa pembayaran yang tidak layak, tidak boleh dilakukan oleh, atau atas nama perusahaan dan bahwa semua pembayaran akan dicatat secara layak dan akurat. UTC, pegawai-pegawai dan agen-agensinya tidak akan melakukan pembayaran yang tidak layak kepada, atau melalui, pihak ketiga kalau semua atau sebagian dari pembayaran-pembayaran itu akan diberikan kepada penerima yang terlarang. Alasannya sederhana: UTC, pegawai-pegawai dan agen-agensinya tidak akan melakukan secara tidak langsung, apa yang mereka tidak boleh lakukan secara langsung.

Kebijakan kami mengenai penggunaan salesman di luar Amerika tercantum dalam Bab 29 Pedoman Kebijakan Perusahaan. Ada prosedur-prosedur terinci untuk menyeleksi, menginvestigasi, merundingkan, menyetujui, mengontrak dan membayar salesman-salesman ini. Seorang Wakil Unit dalam setiap unit bertanggungjawab memastikan pematuhan prosedur-prosedur ini dan *Kode Etik UTC* serta persyaratan-persyaratan legal.

Ketentuan Akuntansi

FCPA dan Konvensi menetapkan bahwa semua buku-buku dan catatan-catatan, pernyataan-pernyataan finansial, dan pengungkapan-pengungkapan dengan akurat mengidentifikasi pembayaran-pembayaran kepada para pejabat publik asing. Akuntansi “di luar pembukuan” dan dokumen-dokumen palsu atau fiktif yang bertujuan menyembunyikan tujuan-tujuan sebenarnya pembayaran-pembayaran ini adalah dilarang.

Hukuman-hukuman

Pelanggaran FCPA dan undang-undang lain yang melaksanakan Konvensi dapat berakibat pada sanksi pidana dan perdata berat bagi UTC dan perorangan-perorangan yang terlibat, termasuk denda dan hukuman penjara. UTC tidak dapat membayar denda yang dikenakan terhadap perorangan-perorangan.

Pelanggaran-pelanggaran *Kode Etik UTC* dan kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur lain akan mengakibatkan tindakan disipliner yang dapat mencakup pemecatan.

UTC menjalankan program pematuhan yang mencakup penilaian-penilaian seksama terhadap calon-calon salesman, perantara dan mitra usaha; audit/peninjauan berkala atas prosedur-prosedur pembayaran; dan pelatihan untuk perorangan-perorangan dan pihak-pihak ketiga yang terlibat dalam transaksi-transaksi yang dicakup dalam FCPA dan undang-undang pelaksanaan Konvensi.

Informasi dan pelatihan tambahan dapat diperoleh dari Pejabat Praktek/Pematuhan Bisnis anda masing-masing.

Kesimpulan

Lebih jauh dari ketentuan-ketentuan hukum, adalah kebijakan UTC untuk bersaing secara adil. Kami ini memperoleh bisnis karena mutu dan daya saing produk-produk dan jasa-jasa kami. Kami tidak akan berusaha memperoleh bisnis dengan landasan lain apapun.

United Technologies Corporation
United Technologies Building
Hartford, CT 06101